



## Jika Hukum Kalah Melawan Kekuasaan

Tak Cuma Penegak Hukum BPK RI Juga Baru Bisa Berjanji

**PONTIANAK-RK.** Tudingan Zulkarnaen Siregar terhadap para penegak hukum Kalbar masih kalah dengan kekuasaan. Yang bekerja setengah hati mendapat tanggapan dari banyak pihak. Terutama, kalangan akademisi. Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

■ Halaman 6

### Jika Hukum .....

.....dari halaman 1

DR Zulkarnaen, menilai pola penegakan hukum di Kalbar masih kalah dengan kekuasaan. "Ini yang celaka kalau hukum sudah terkalahkan dengan kekuasaan. Ini yang menyebabkan kasus-kasus korupsi di Kalbar sulit diberantas," ungkap Zulkarnaen, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (8/11).

Sehingga, menurut dia, beberapa kasus yang pernah mencuat tidak ada kejelasannya. "Artinya abu-abu. Harusnya penegakan hukum itu hitam-putih. Jadi jelas," katanya.

Ketua Pengelola Program Magister Sosial Untan Pontianak ini menilai, jika hal tersebut terus dibiarkan, maka kejahatan dalam bentuk apapun di Kalbar tidak pernah tuntas. "Ini yang menjadi tabir harus dibuka, salah-benar tidak dibuktikan. Kita khawatir kalau dibiarkan, maka masa depan hukum di Kalbar akan gelap," tutup Zulkarnaen.

Sementara, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar, menyebut jika Panitia Khusus (Pansus) Dana Paskabencana jadi dibentuk anggota DPRD Provinsi Kalbar tentu menjadi harapan untuk mengkaji dugaan kasus korupsi pada Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar.

"Namun kita berharap, supaya kinerjanya juga harus transparan," ungkap Sekjen Solmadapar, Yunus, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (9/11).

Karena, ia menilai, selama ini beberapa Pansus yang sudah dibentuk tidak menunjukkan kredibilitas dengan baik. "Ada Pansus, progress-nya tidak nampak. Seharusnya kerja

mereka harus maksimal dalam mengkaji berbagai permasalahan korupsi yang sudah merajalela di lingkungan birokrasi kita," harapnya.

Menyikapi usulan Pansus tersebut, pihaknya bersama organisasi mahasiswa di Kalbar berjanji mengkawal kinerja para legislator. "Namun kita tetap akan kawal Pansus yang akan dibentuk komisi C itu. Kita siap mengawasi dengan beberapa organisasi mahasiswa lainnya," kata Yunus.

Demikian juga dengan terkuaknya dugaan kasus penyimpangan dana pasca bencana tahun 2011 yang di kelola Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Yunus kembali mempertanyakan komitmen dari aparat penegak hukum Kalbar.

"Kita berharap aparat penegak hukum cepat merespon setelah kabar itu terkuak. Harus dibuka semua, sampaikan ke Publik. Karena selama ini kita menilai kinerja aparat penegak hukum di daerah tumpul dalam menangani kasus-kasus korupsi. Seperti dana Bansos yang tak jelas kemana rimbanya. Sehingga kita bertanya ada apa ini," tanya Yunus.

Selain itu, ia berharap penegakan hukum yang terkesan tebang pilih di Kalbar harus segera dihentikan. "Apapun instansinya, aparat penegak hukum jangan takut, karena masyarakat Kalbar sudah muak dengan beberapa kasus korupsi yang tidak pernah jelas penyelesaiannya," pungkas Yunus.

Senada disampaikan ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalbar, Sumadi mengapresiasi kinerja Komisi C DPRD Provinsi Kalbar

yang akan membentuk Pansus dalam menangani dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar.

"Itu memang kewenangan DPRD dalam membentuk Pansus sesuai dengan perannya. Kita mendukung adanya Pansus ini. Selain itu, kita melakukan pengawasan nantinya. Tetap kita kawal," ungkap Sumadi, Jumat (8/11).

Kendati demikian, lanjutnya, apabila Pansus tersebut sudah dibentuk, harus menunjukkan integritasnya. "Pansus yang sudah dibentuk itu juga jangan sampai masuk angin, jangan sampai cuma menang gap. Artinya, tidak ada hasilnya. Kata orang, jangan hanya panas-panas taik ayam. Terbaik, libatkan masyarakat dan akademisi melalui public hearing," tegas Sumadi.

Ia berharap, aparat penegak hukum di Kalbar segera merespon atas dugaan kasus korupsi dana paskabencana tersebut. "Kita harap juga, dengan adanya dugaan korupsi tersebut, aparat yang berwenang seperti Kejaksaan dan Kepolisian, BPK. Kalau perlu KPK. Jangan tinggal diam. Jangan menunggu laporan, kalau ada temuan harus cepat respon. Turun langsung ke lapangan," pungkasnya.

Sementara, terkait penyimpangan dana paskabencana yang masuk ke Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Hasan Bisri SE MM berjanji memeriksa aliran dana tersebut.

"Kami akan periksa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat dan Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Kalbar," usai memberi materi dalam sosialisasi Peran BPK RI dan DPR RI Dalam Mengkawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara di Hotel Mercure Pontianak, Jumat (8/11).

Ia menegaskan, jika memiliki cukup bukti, maka segera dilaporkan ke BPK untuk diperiksa. "Kalau memang punya bukti-bukti silahkan laporkan saja. Kalau bukti-bukti cukup kami akan lakukan pemeriksaan khusus untuk dana pasca bencana ini," pinta dia.

Selain itu, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditengarai publik ada "tarik-ulur"-nya adalah kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) untuk Komite Olah Raga Nasional (KONI) dari Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2006-2008. Kerugian negara diperkirakan Rp22,14 miliar.

Kasus yang diduga melibatkan beberapa mantan petinggi Kalbar tersebut tak kunjung tuntas ditangani pihak Polda dan Kejati Kalbar, meski kepala dua instansi itu sudah berganti.

Bahkan, laporan dana Bansos tersebut yang konon sedang diaudit oleh BPK Perwakilan Kalbar tidak kunjung selesai. Hasan Bisri berjanji menanyakan hal itu ke BPK Perwakilan Kalbar.

"Saya akan tanya ke kepala perwakilan BPK di Kalbar nanti. Sebab, proses pemeriksaan itu tidak bisa terburu-buru. Jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Kita perlu waktu yang cukup. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan itu," tutupnya singkat.

Laporan : Andreas  
Editor : Mohamad iQbaL